SURVEI

PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LALU

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



Latar Belakang & Tujuan

Kajian ini memotret penilaian dan harapan publik terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu

CURRENT ISSUE

Berbagai kasus **Pelanggaran HAM masa lalu** belum dituntaskan oleh pemerintahan periode 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

STRATEGIC OBJECTIVE

Mendorong Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, untuk dapat **menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu** dalam program kerja mendatang.

RESEARCH OBJECTIVE

Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang *KOMPAS* akan melakukan survei untuk memotret **Kepedulian Publik** terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta menggali **Harapan Publik** terhadap kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo & Ma'ruf Amin dalam menuntaskan kasus –kasus HAM.

KEY SUBJECT

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan memetakan persoalan, sebagai acuan Rekomendasi Strategis bagi Komnas HAM

MENGETAHUI PERSEPSI PUBLIK (*awareness*)

MENGUKUR KEPUASAN PUBLIK (*satisfaction*)

MENGEKSPLORASI EKSPEKTASI PUBLIK (*desire*)

EVALUASI PUBLIK TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAM & PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



Cakupan Penelitian

Kajian ini mengevaluasi penilaian publik terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM Berat masa lalu

PEMAHAMAN
Mengukur pengetahuan publik tentang:
- Kasus-kasus pelanggaran HAM
- Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
- Kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya

PENILAIAN
Mengukur kepuasan publik terhadap:
- Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM & pelanggaran HAM berat masa lalu
- *Political Will* pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM
- Kemampuan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM

HARAPAN
Mengeksplorasi harapan publik terhadap:
- Program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Bidang hukum dan HAM
- Peran Lembaga Komnas HAM dalam mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM
- Peran penegak hukum lainnya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM & PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - *Face to Face Interview*

- ✓ Menggunakan kuesioner
- ✓ Durasi wawancara maksimal 60 menit
- ✓ Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih
- ✓ Menjangkau lebih banyak responden (dalam jumlah ratusan responden)
- ✓ Analisa dilakukan secara statistik deskriptif
- ✓ Tidak bertujuan mendapatkan alasan mendalam atas pertanyaan: "mengapa"



Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - *Face to Face Interview*

RESPONDEN	
Usia	17 – 65 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki & Perempuan (proporsional 50:50)
SEC	Bawah – Menengah – Atas (distribusi normal)
Wilayah Penelitian	34 Provinsi di Indonesia
Jumlah Responden	1,200 responden ; *sampling error* +/- 2.8%



LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

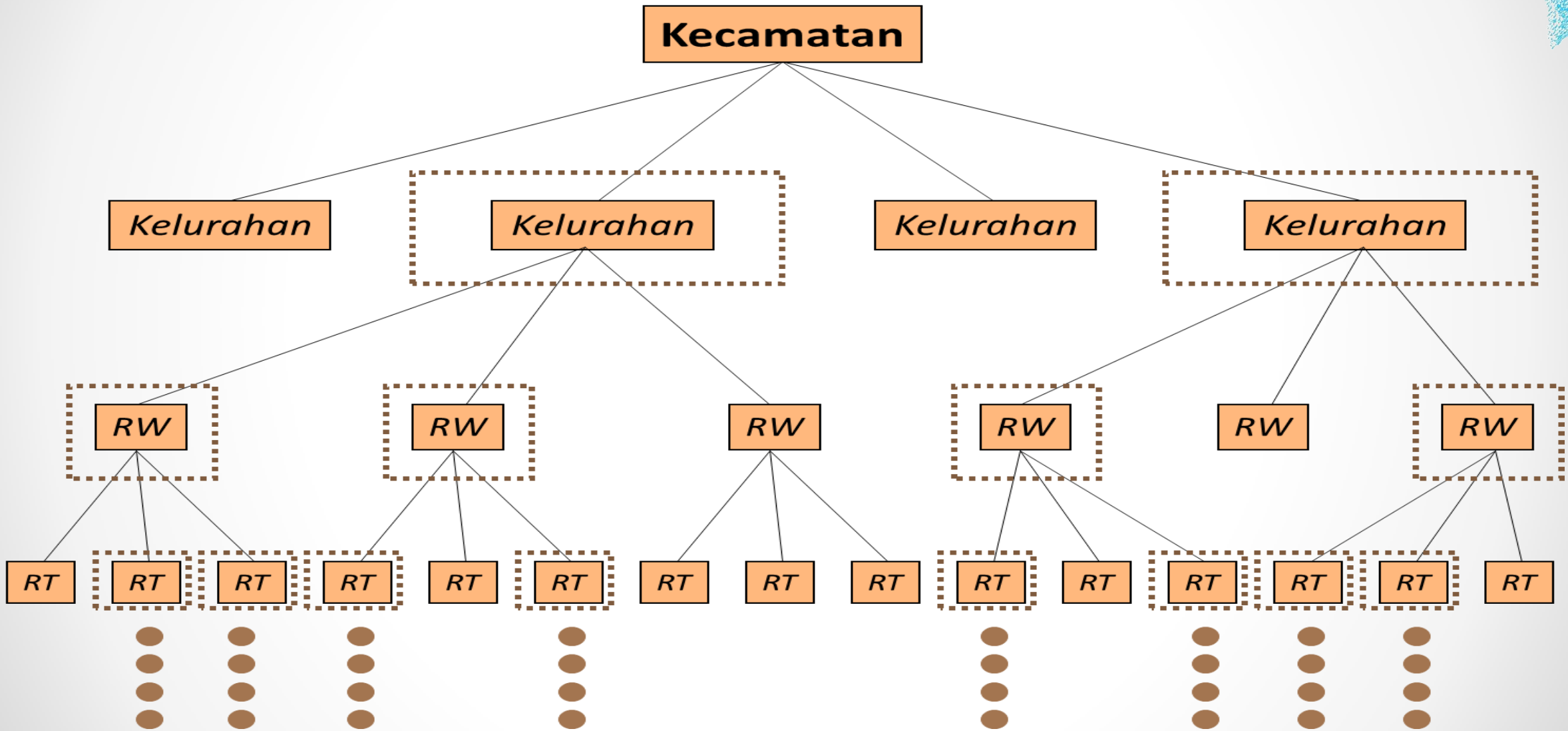


Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia



Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Multistage Random Sampling*



Timeline

Kuantitatif Survei - *Face to Face Interview* - 12 Weeks

Activity	Week											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Preparation												
Instrument Construction F2F												
Field				23 September – 4 Oktober 2019								
QC, Coding, dan Data Entry												
Analysis dan Reporting												
Presentation												

N= 1,200 respondent ; SE = 2.8%

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



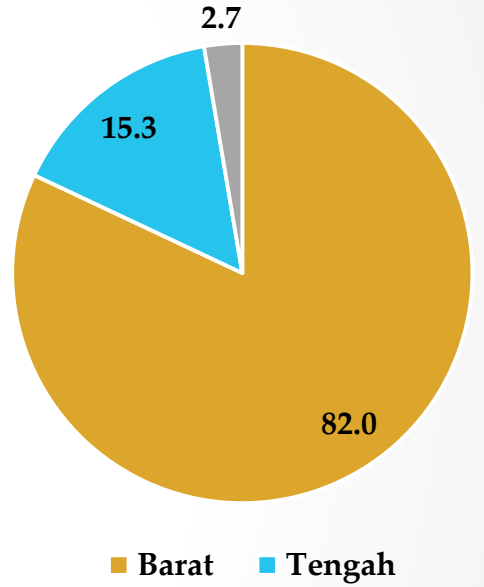
Profil Responden

Responden sudah mewakili populasi Indonesia secara proporsional

No.	Provinsi	N	(%)
1.	D.I Aceh	25	2.1
2.	Bali	16	1.3
3.	Banten	56	4.7
4.	Bengkulu	8	0.7
5.	D.I Yogyakarta	16	1.3
6.	DKI Jakarta	48	4.0
7.	Gorontalo	8	0.7
8.	Jambi	16	1.3
9.	Jawa Barat	220	18.3
10.	Jawa Tengah	172	14.3
11.	Jawa Timur	192	16.0
12.	Kalimantan Barat	24	2.0
13.	Kalimantan Selatan	15	1.3
14.	Kalimantan Tengah	16	1.3
15.	Kalimantan Timur	12	1.0
16.	Kalimantan Utara	4	0.3
17.	Kepulauan Bangka Belitung	8	0.7

No.	Provinsi	N	(%)
18.	Kepulauan Riau	8	0.7
19.	Lampung	36	3.0
20.	Maluku	8	0.7
21.	Maluku Utara	8	0.7
22.	Nusa Tenggara Barat	24	2.0
23.	Nusa Tenggara Timur	24	2.0
24.	Papua	8	0.7
25.	Papua Barat	8	0.7
26.	Riau	28	2.3
27.	Sulawesi Barat	8	0.7
28.	Sulawesi Selatan	40	3.3
29.	Sulawesi Tengah	16	1.3
30.	Sulawesi Tenggara	8	0.7
31.	Sulawesi Utara	8	0.7
32.	Sumatera Barat	8	0.7
33.	Sumatera Selatan	36	3.0
34.	Sumatera Utara	68	5.7
	Total Responden	**1.200**	**100 %**

Berdasarkan pembagian wilayah (%)



Wilayah Barat : Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah

Wilayah Tengah: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara

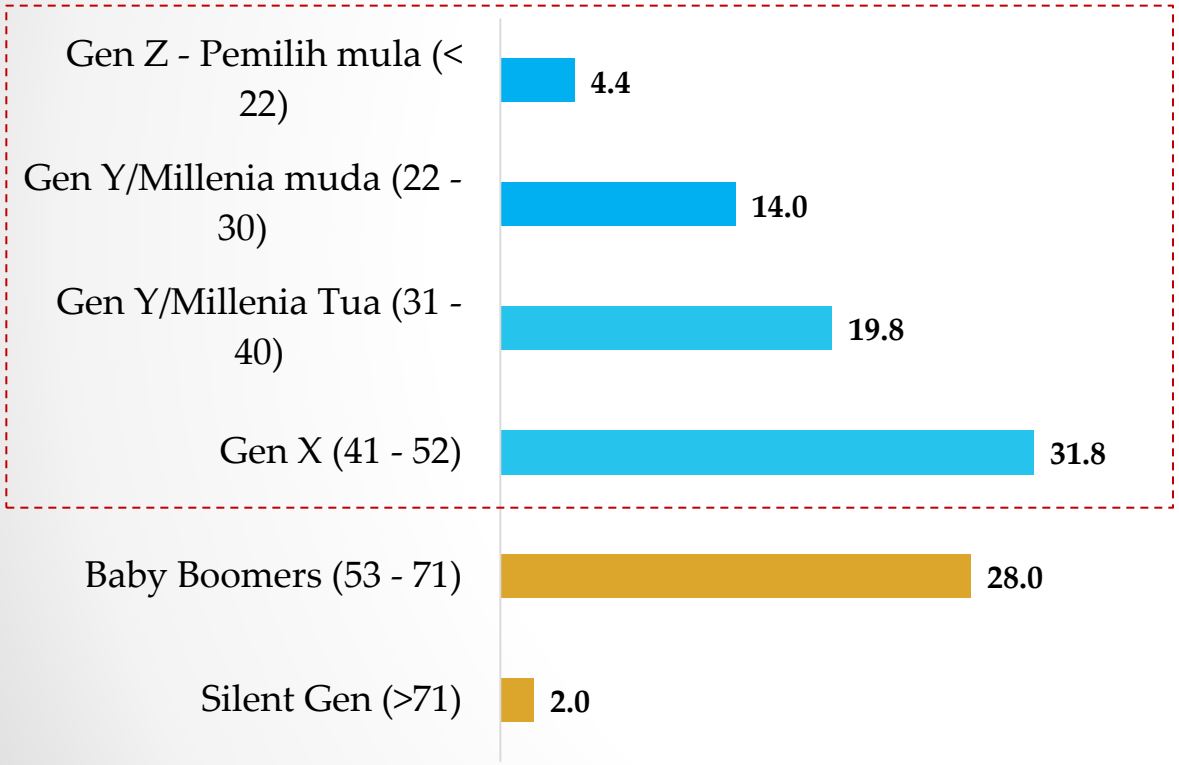
Wilayah Timur : Maluku dan Papua

N = 1.200; SE = ±2,8%

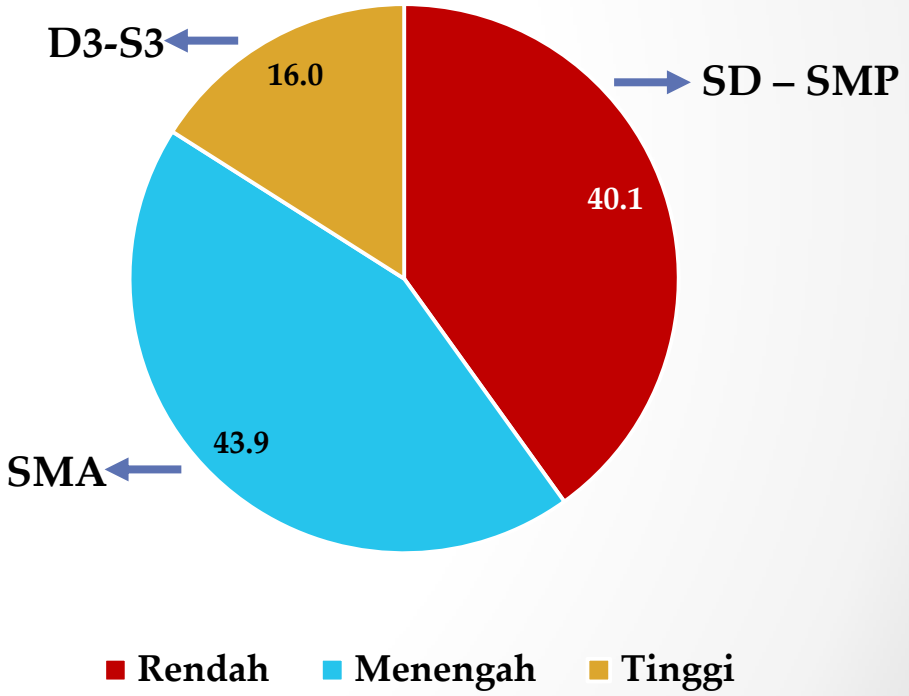
Profil Responden

Proporsi kelompok usia produktif lebih besar, dengan tingkat pendidikan lulusan menengah dan tinggi

Usia (%)



Tingkat Pendidikan (%)

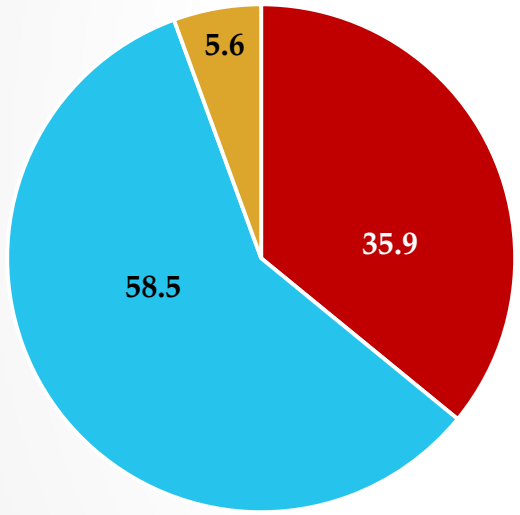


N = 1.200; SE = ±2,8%

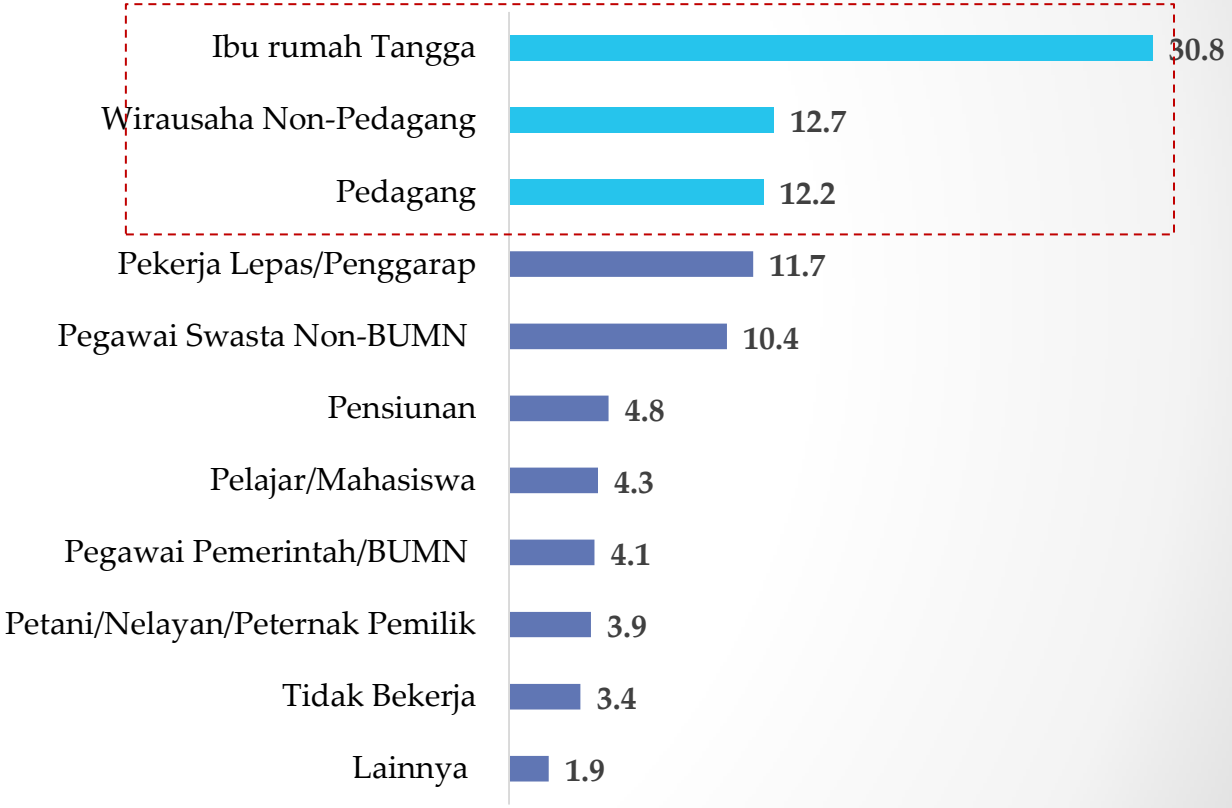
Profil Responden

Sebagian besar responden berasal dari kelas ekonomi bawah dan menengah

Kelas Sosial Ekonomi (%)



Pekerjaan (%)

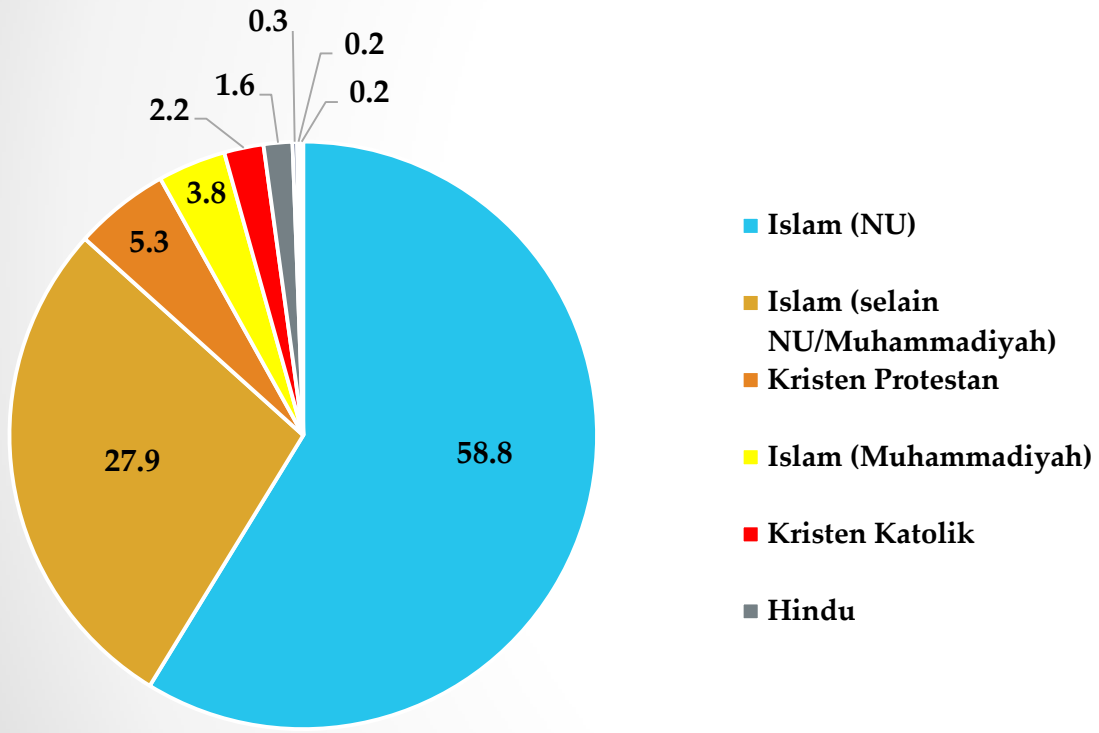


N = 1.200; SE = ±2,8%

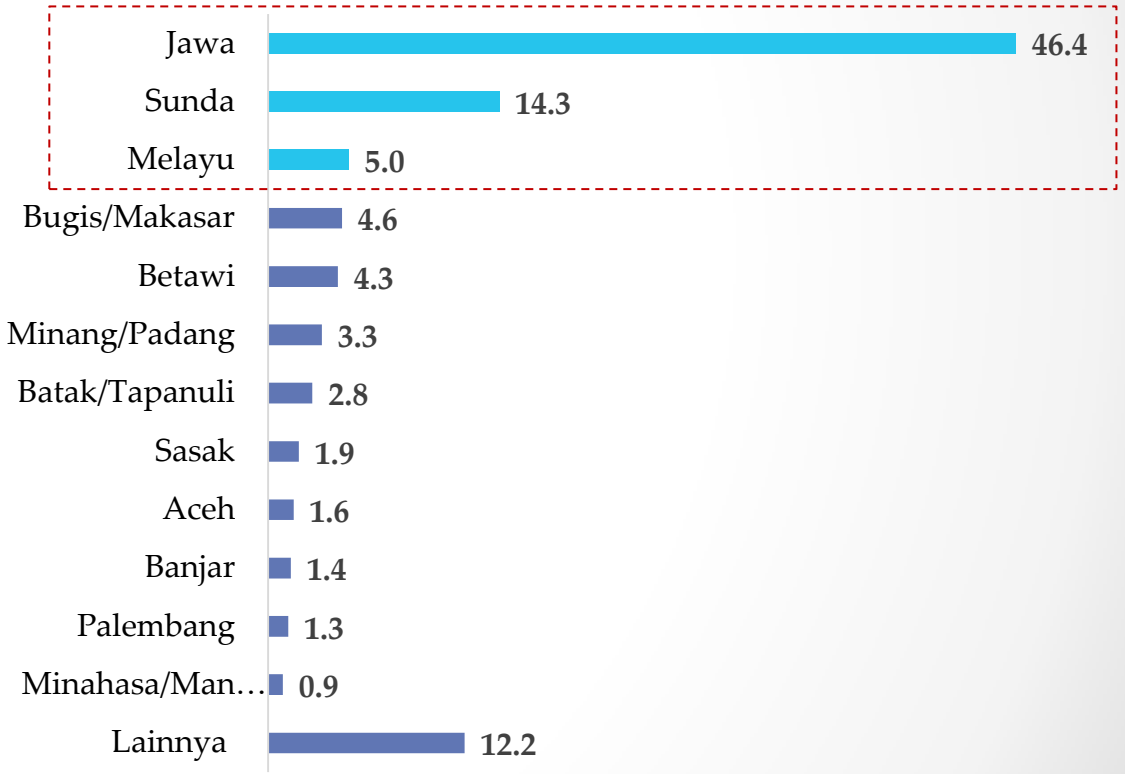
Profil Responden

Sebagian besar responden beragama Islam dengan suku terbanyak Jawa, Sunda dan Melayu

Berdasarkan agama (%)



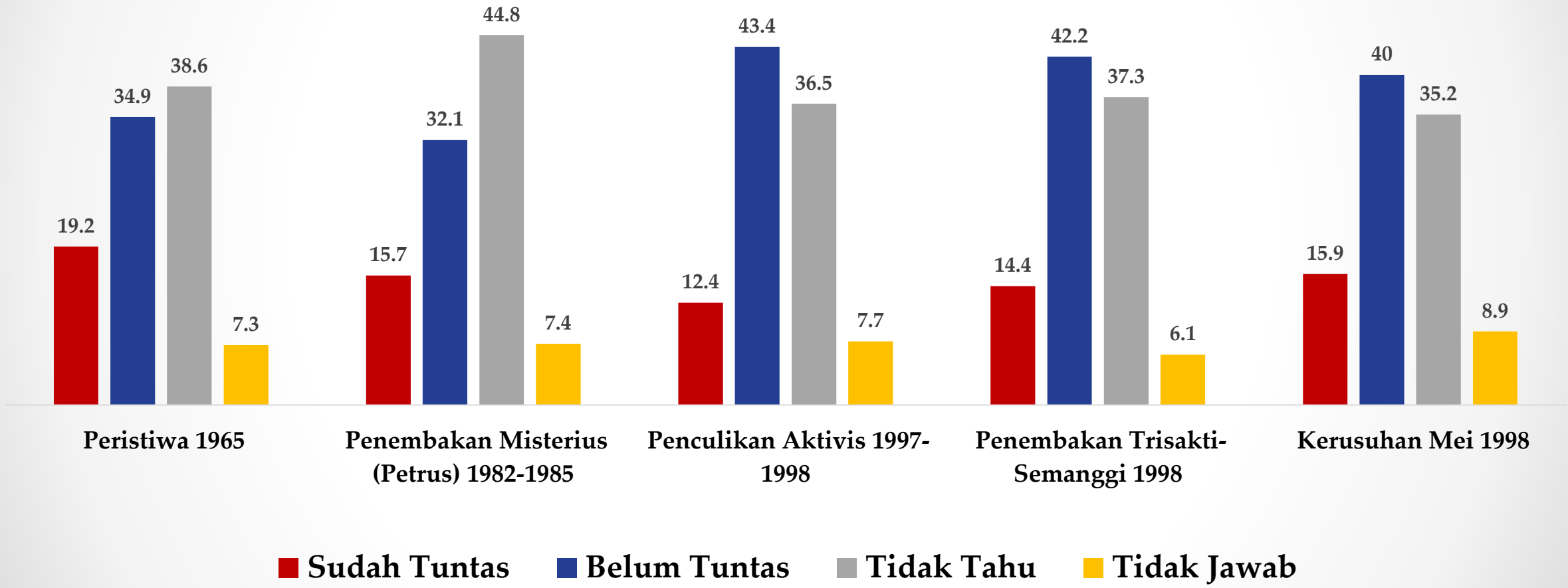
Berdasarkan suku bangsa (%)



N = 1.200; SE = ±2,8%

Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

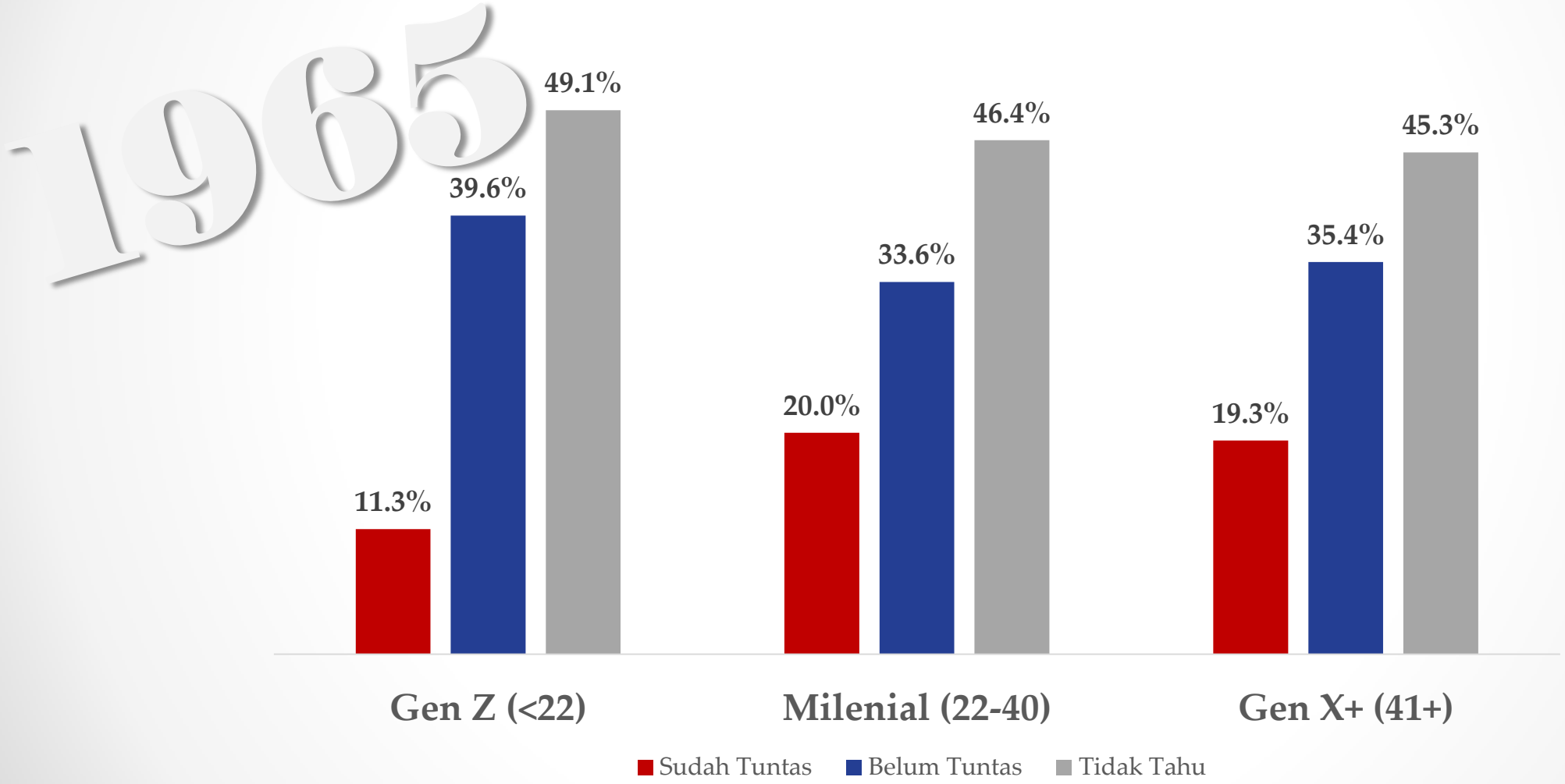
Penyelesaian kasus masih simpang siur di mata publik



N = 1.200; SE = ±2,8%

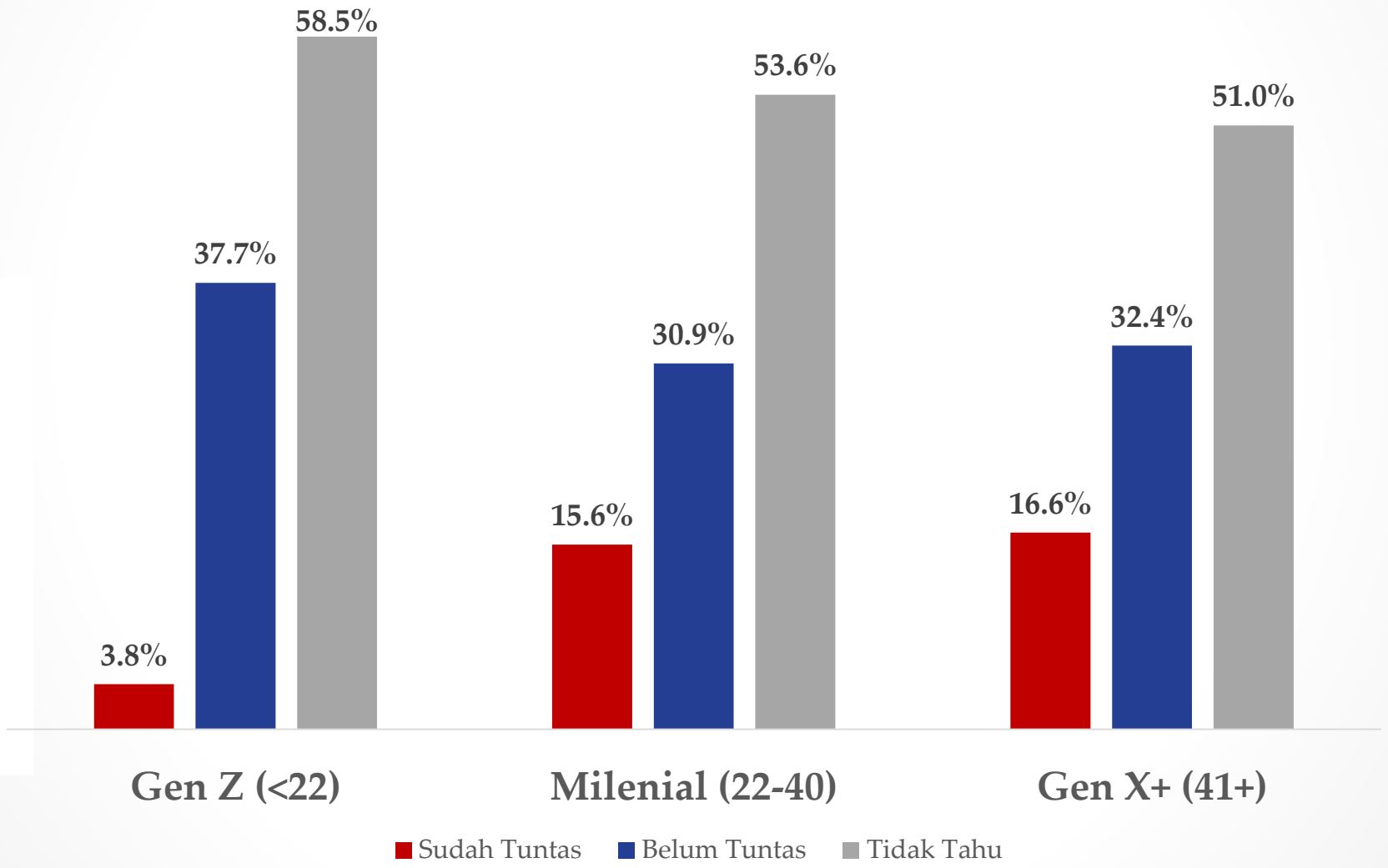
Penyelesaian Kasus: Peristiwa 1965

Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas



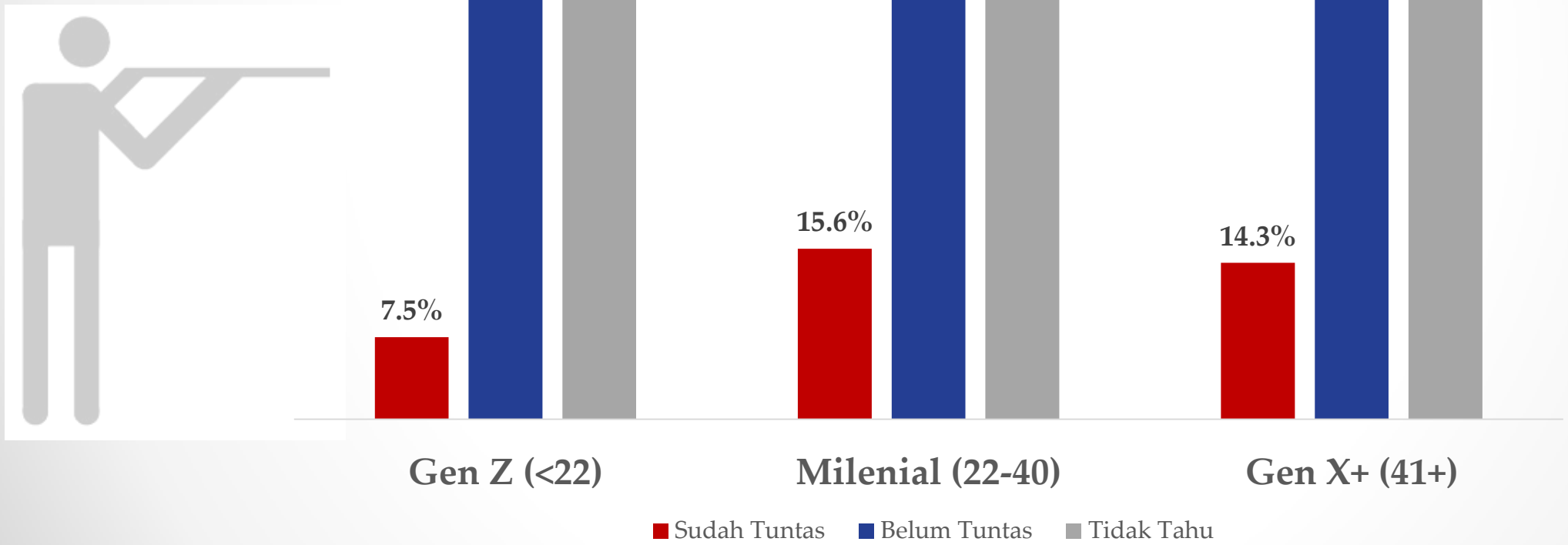
Penyelesaian Kasus: Penembakan Misterius 1982-1985

Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas



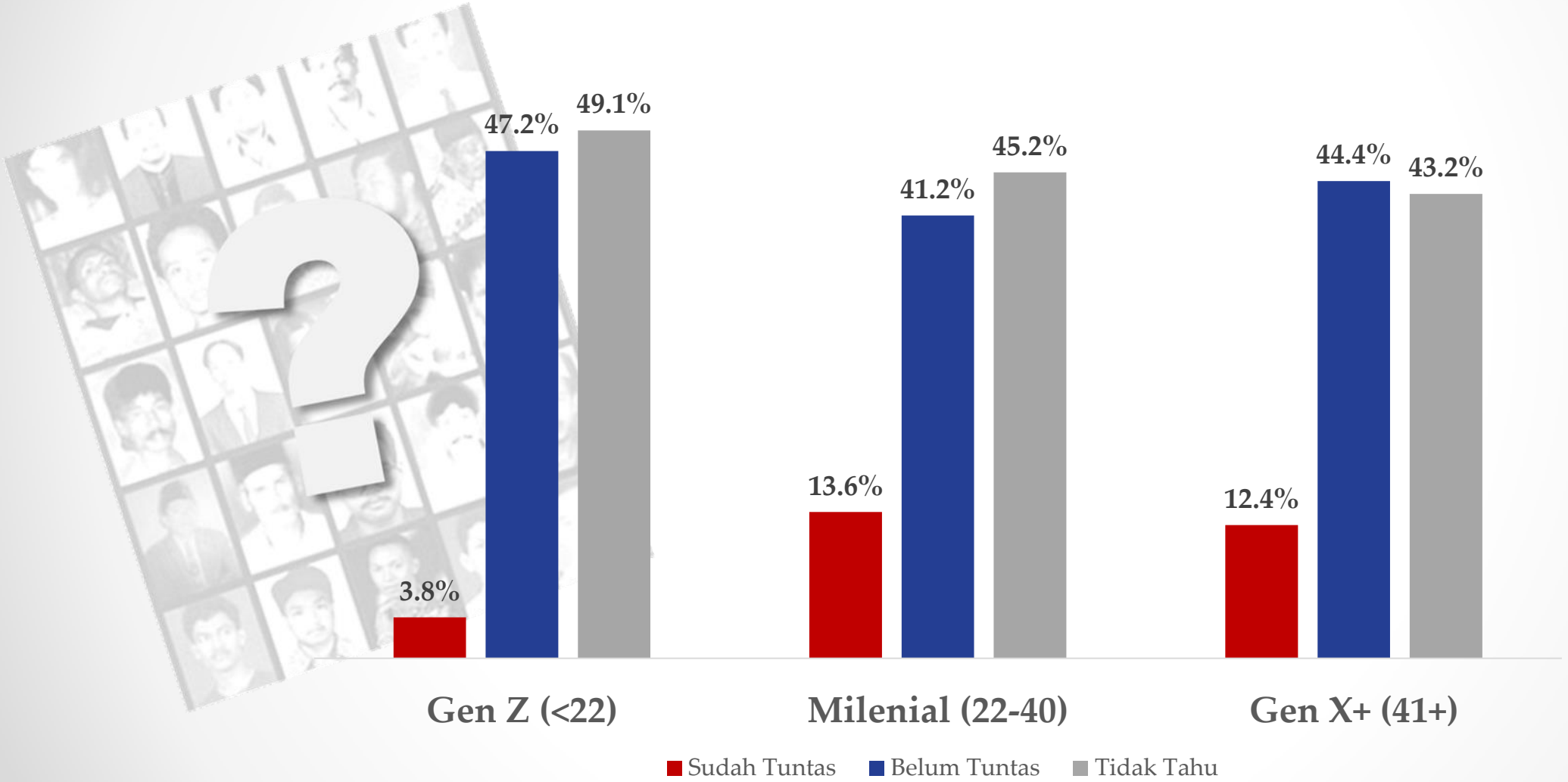
Penyelesaian Kasus: Peristiwa Trisakti-Semanggi 1998

Kecuali GenX+ , generasi yang lebih muda lebih banyak yang tidak mengetahui proses penyelesaian kasus Trisakti-Semanggi, sebagian menyatakan sudah tuntas



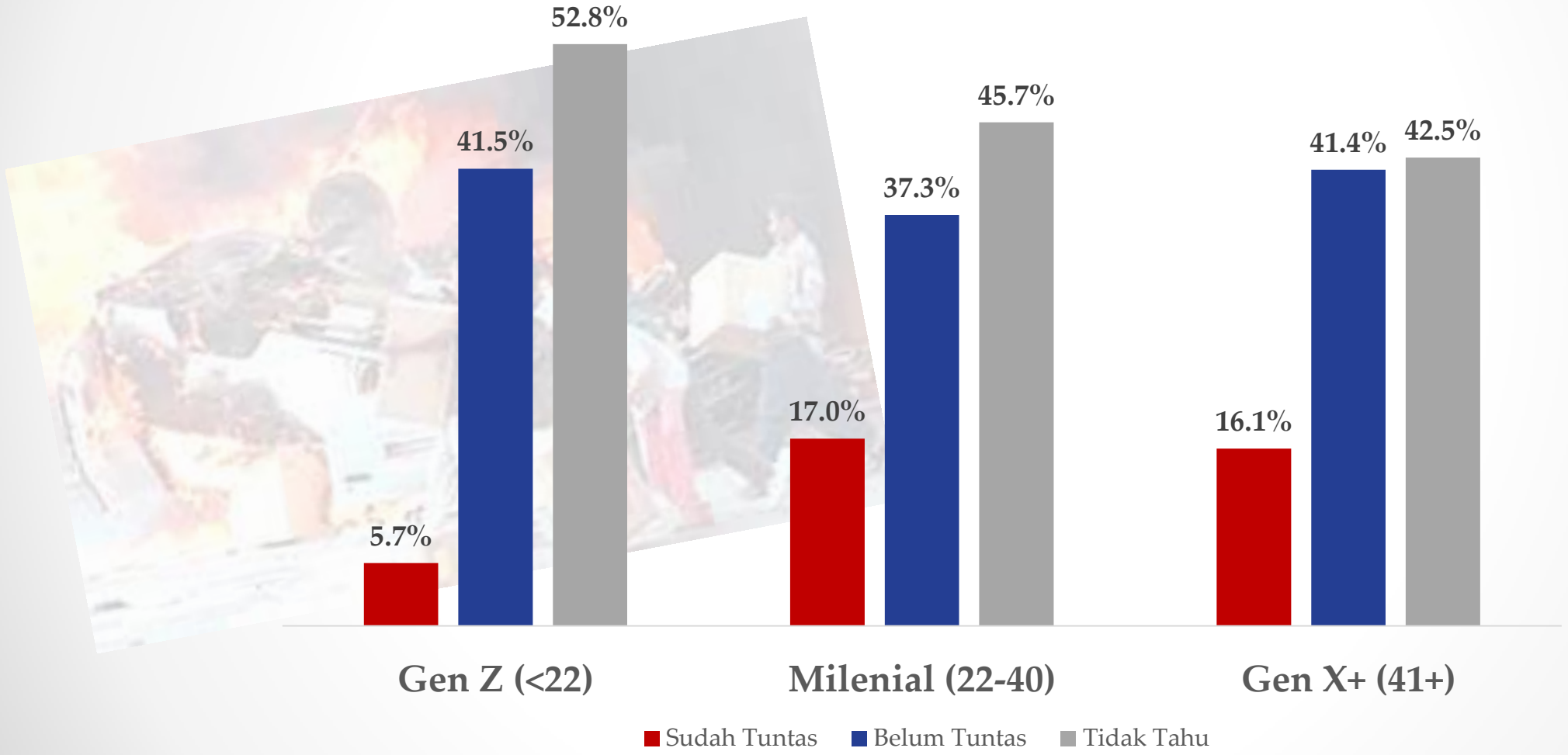
Penyelesaian Kasus: Penculikan Aktivis 1997-1998

Kecuali GenX+ , generasi yang lebih muda lebih banyak yang tidak mengetahui proses penyelesaian kasus penculikan aktivis, sebagian menyatakan sudah tuntas



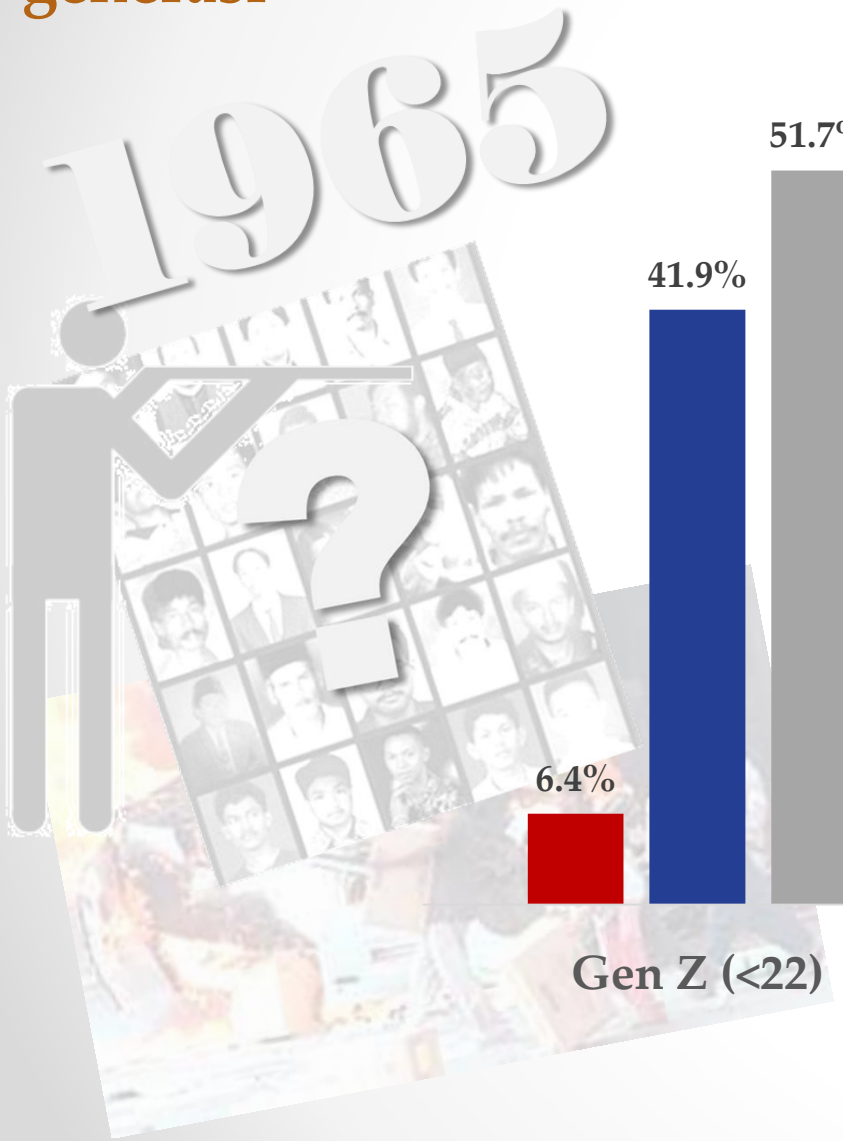
Penyelesaian Kasus: Kerusuhan Mei 1998

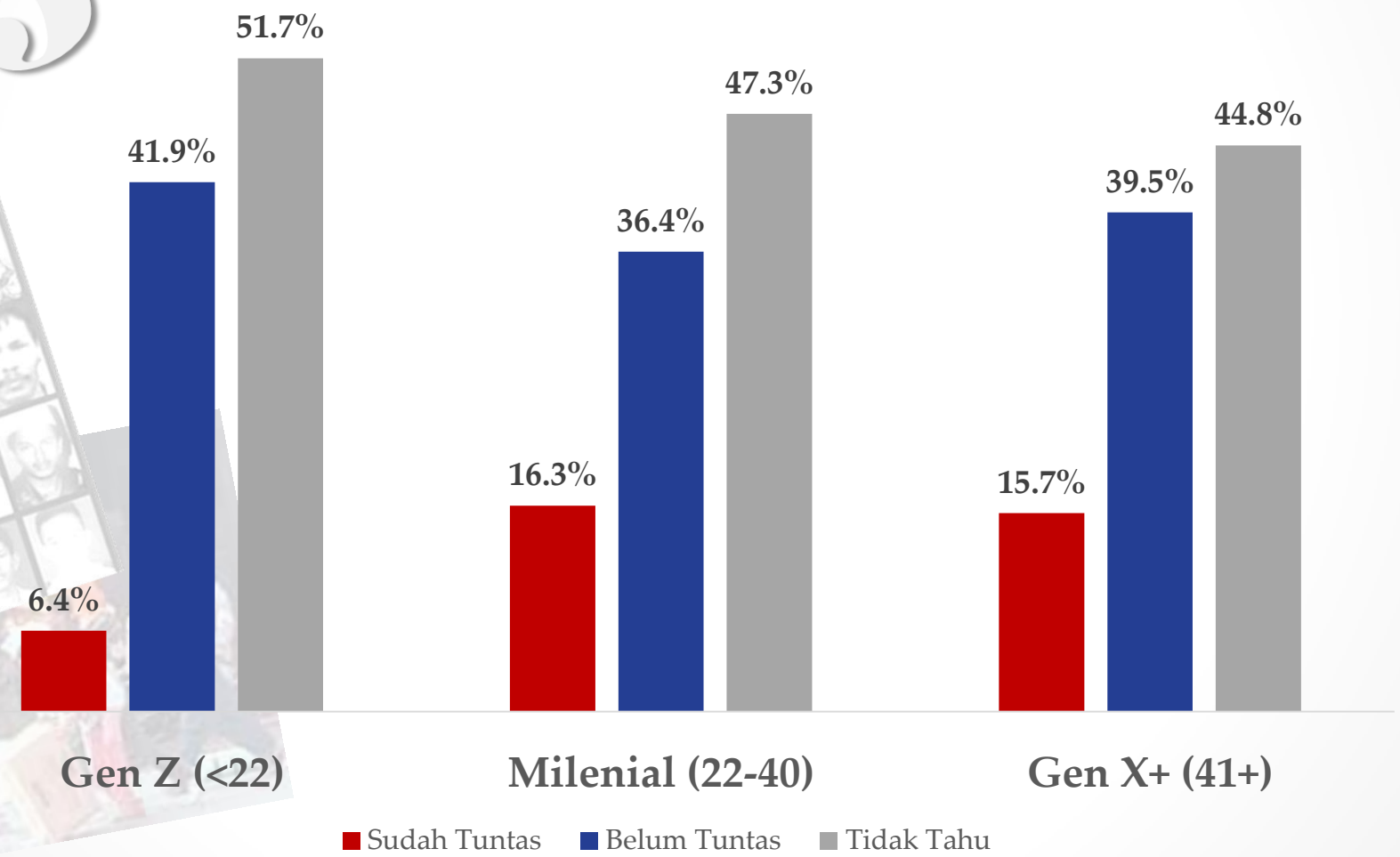
Di semua generasi sebagian besar tidak mengetahui proses penyelesaian kasus Mei 1998, dan sebagian lainnya menyatakan sudah tuntas



Penyelesaian Semua Kasus (Indeks)

Diperlukan edukasi terkait kasus HAM dan proses penyelesaiannya, di semua generasi

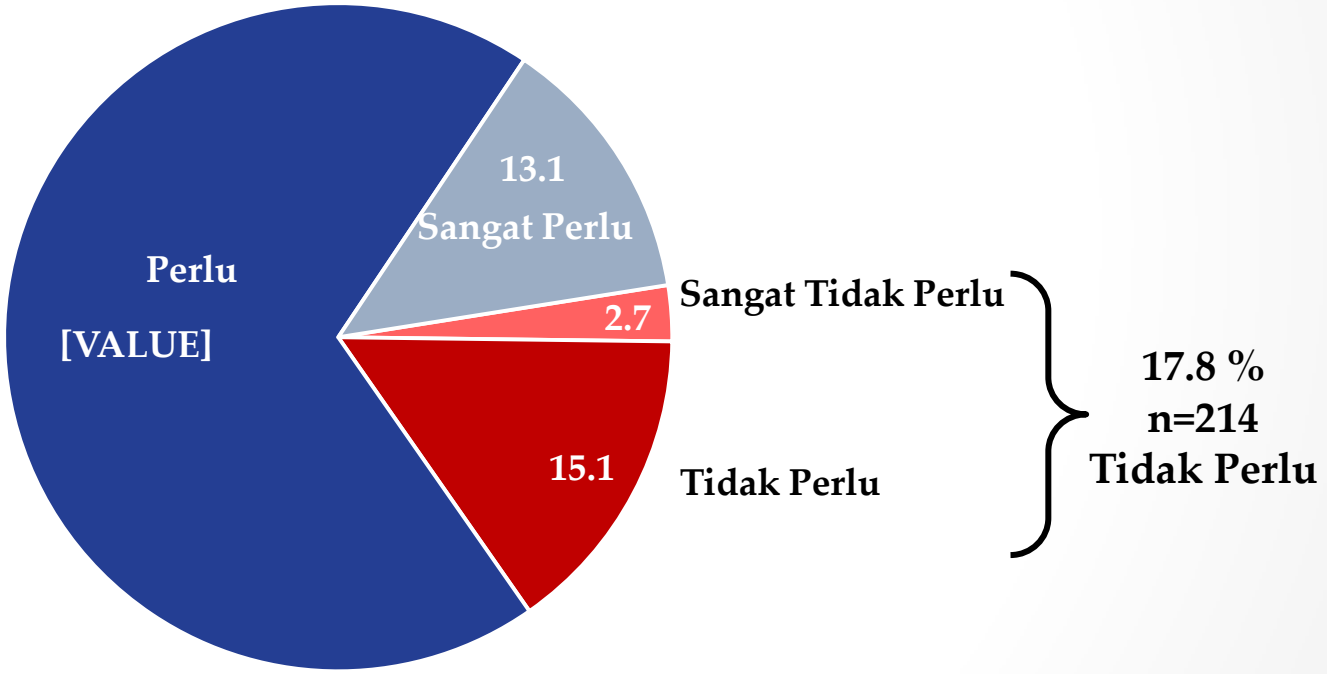




Kasus HAM Masa Lalu - Perlu Dituntaskan

Meski mayoritas responden berpendapat Kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan, masih ada sebagian yang berpendapat tidak perlu

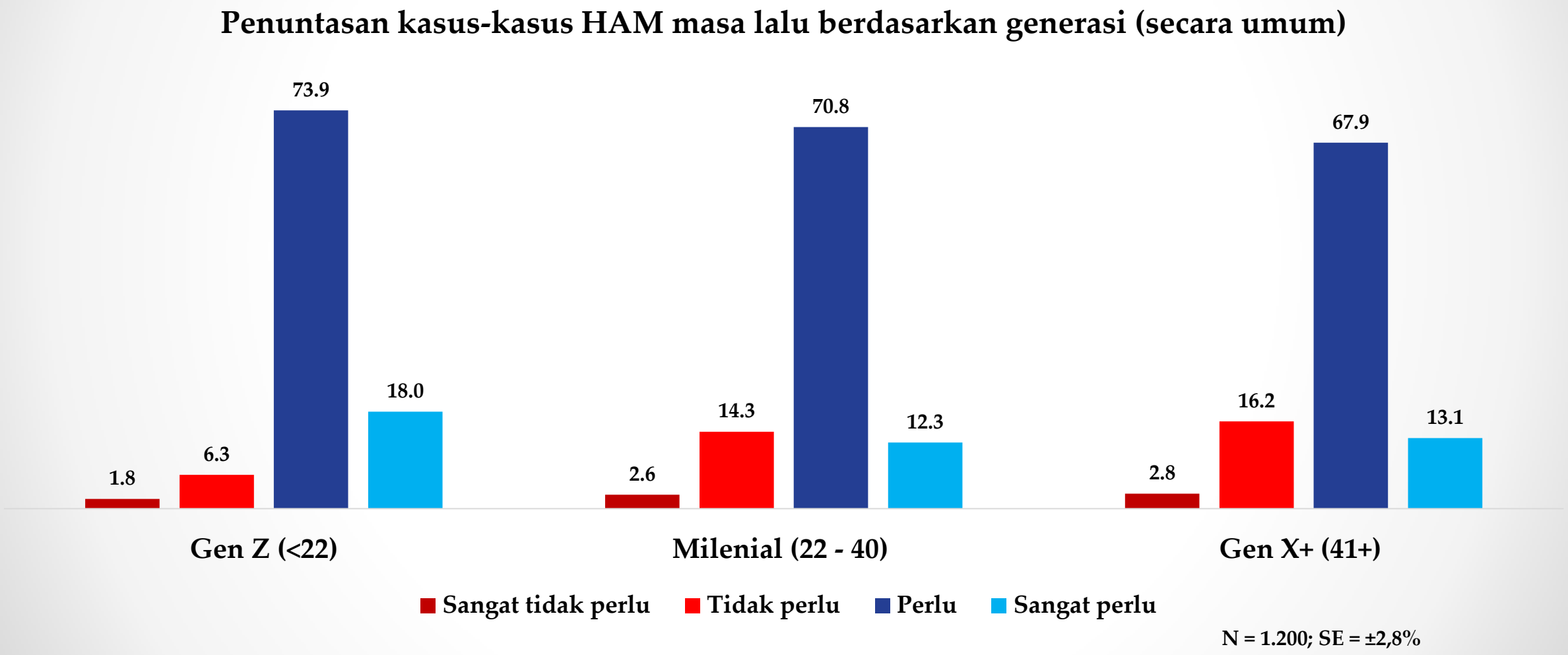
Kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan (%)



N = 1.200; SE = ±2,8%

Kasus-kasus HAM Masa Lalu Perlu Dituntaskan

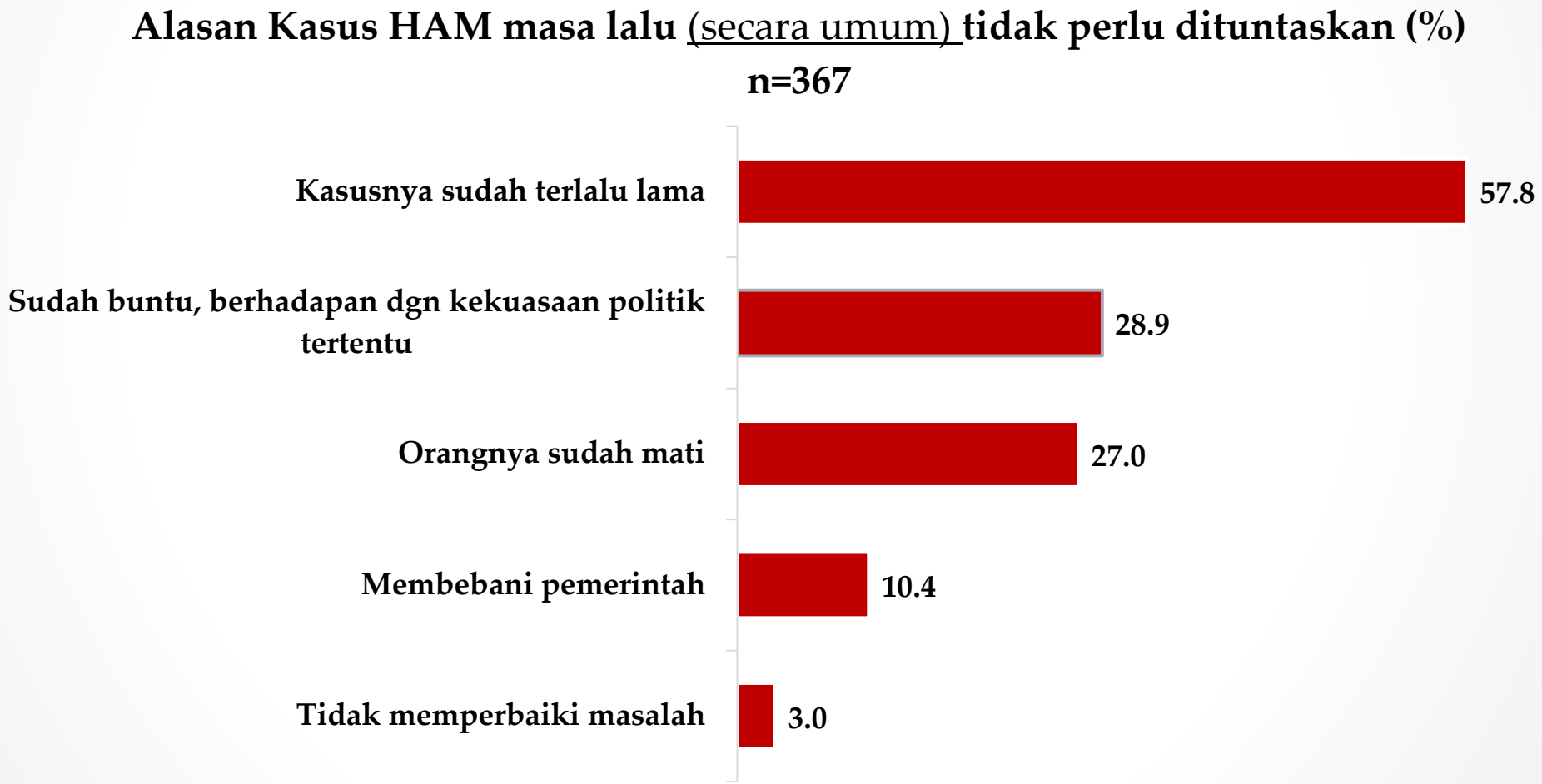
Seluruh kelompok generasi berpendapat kasus-kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan



N = 1.200; SE = ±2,8%

Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan

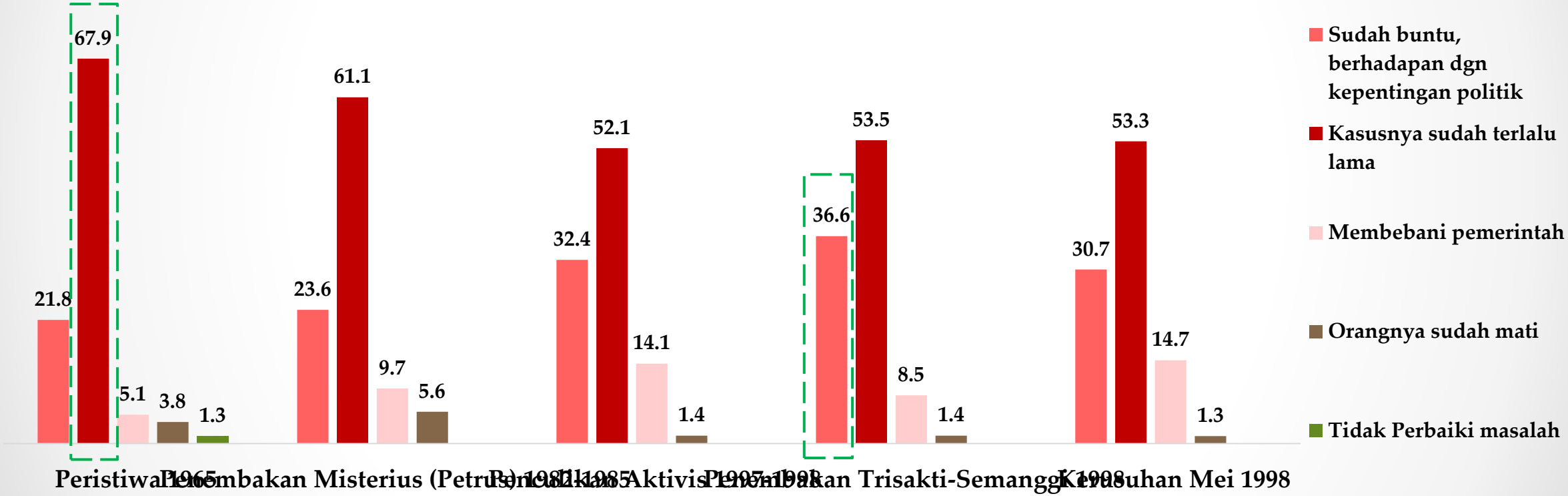
Mereka pesimis sebab kasus sudah terlalu lama, dan berhadapan dengan kepentingan politik



Alasan mereka yang menjawab Tidak Perlu dituntaskan

Peristiwa 1965 dan penembakan mahasiswa Trisakti 1998, dianggap sebagai kasus yang sulit dituntaskan

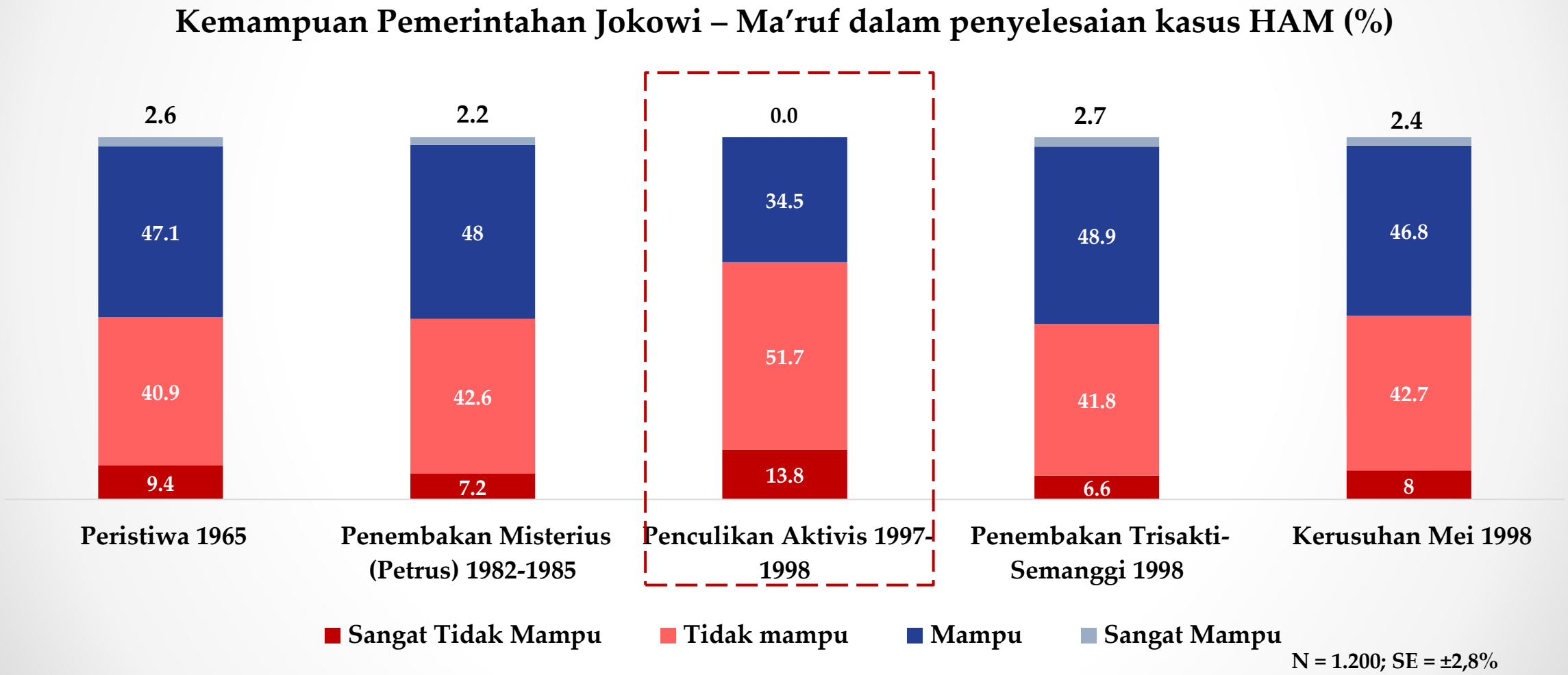
Alasan Kasus HAM masa lalu (per kasus) tidak perlu dituntaskan (%)



N = 367

Keyakinan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

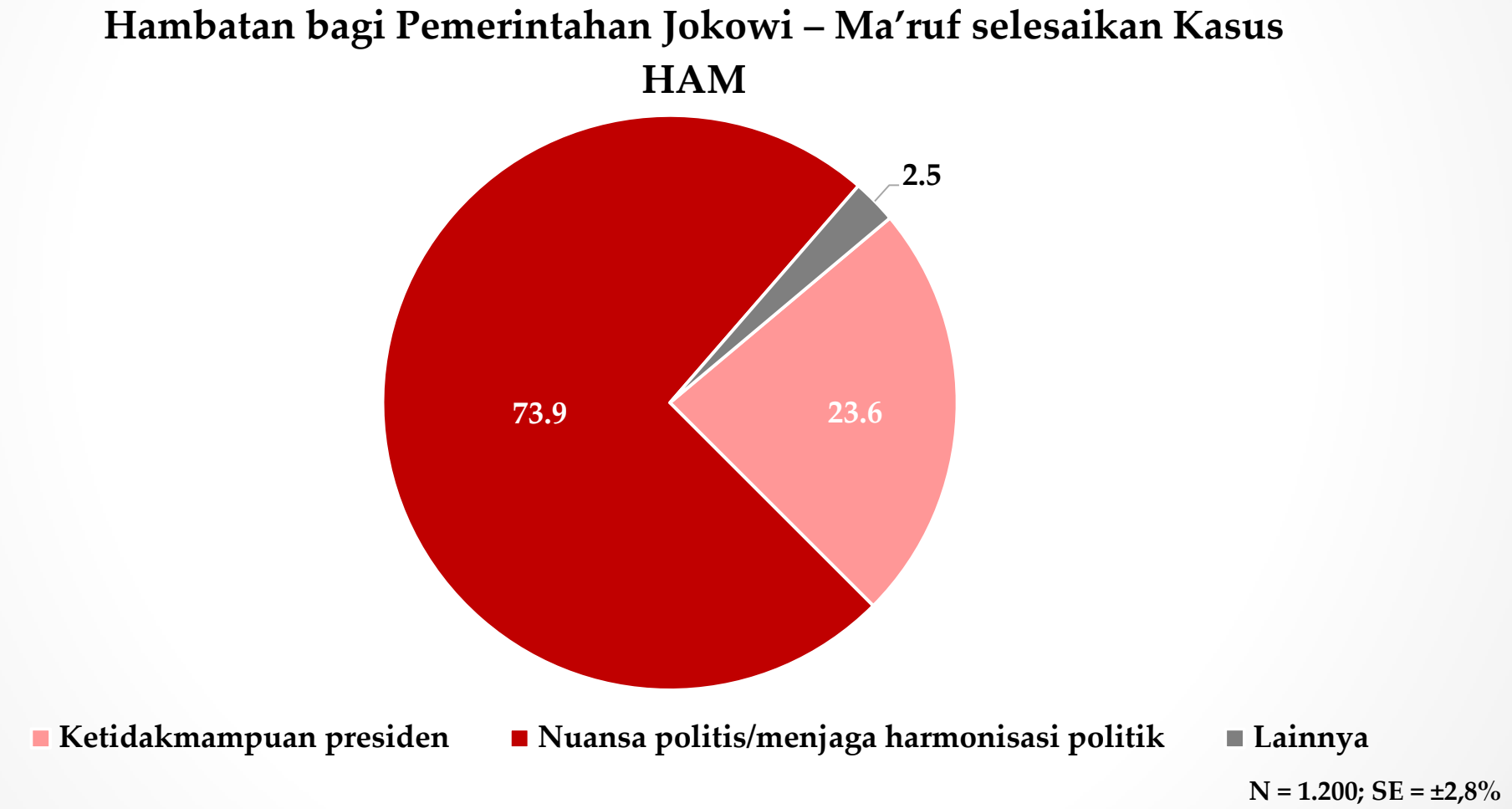
Publik meragukan kemampuan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, terutama penculikan aktivis



N = 1.200; SE = ±2,8%

Hambatan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nuansa Politis/harmonisasi politik dianggap sebagai hambatan terbesar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu

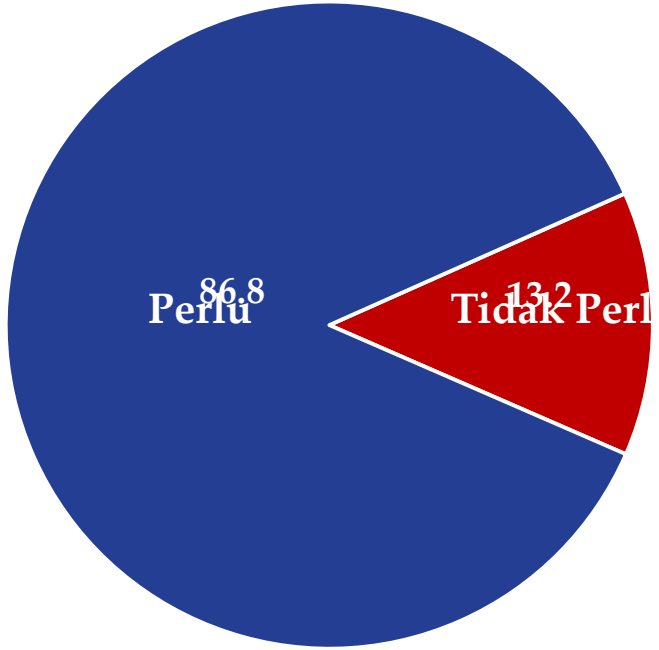


N = 1.200; SE = ±2,8%

Komitmen terhadap penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

Mayoritas responden berpendapat Jokowi – Ma'ruf perlu mencantumkan penyelesaian kasus HAM dalam Program Kerja Pemerintah 2019-2024

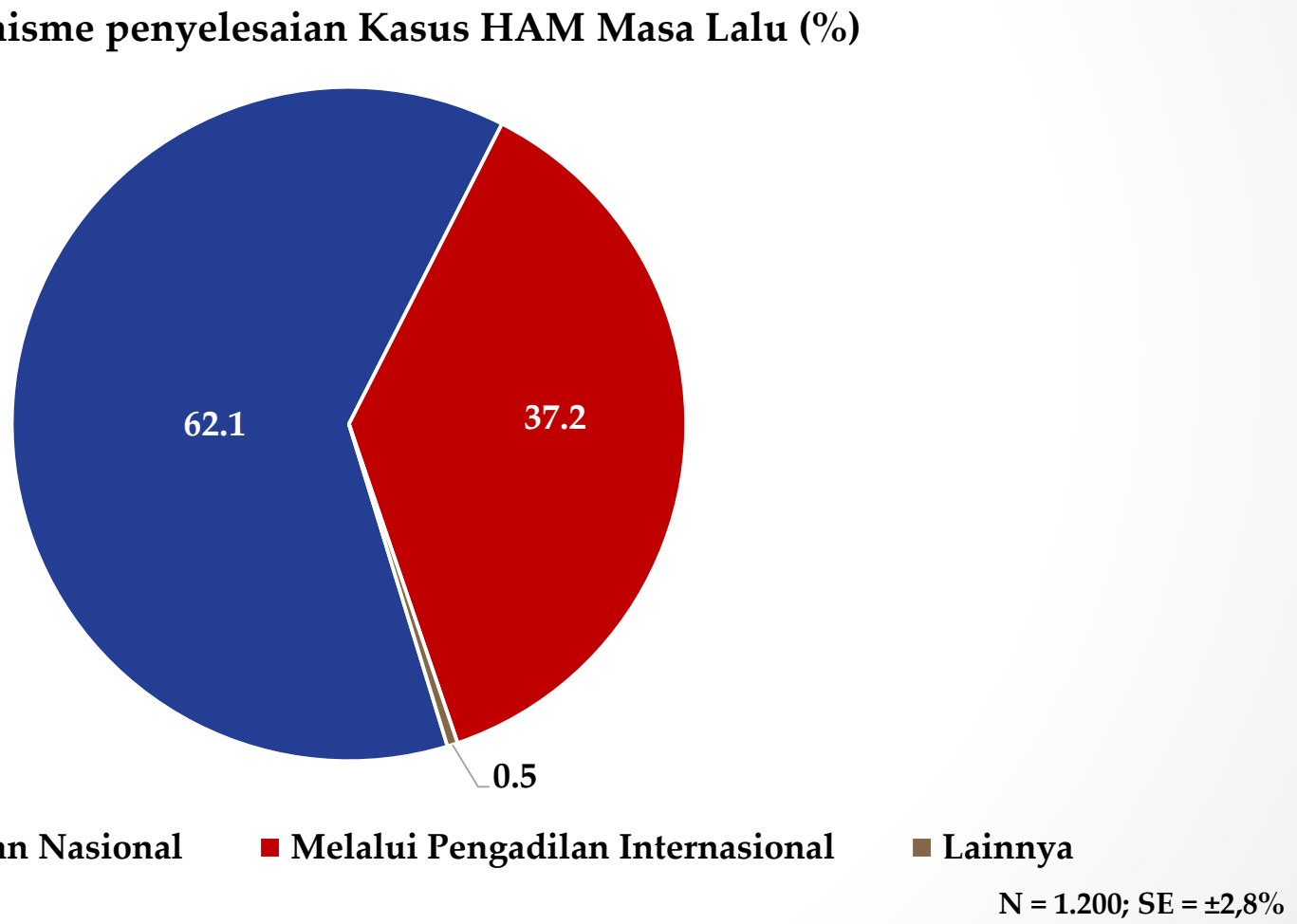
Program Kerja Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf tentang Kasus HAM masa lalu (%)



N = 1.200; SE = ±2,8%

Mekanisme Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

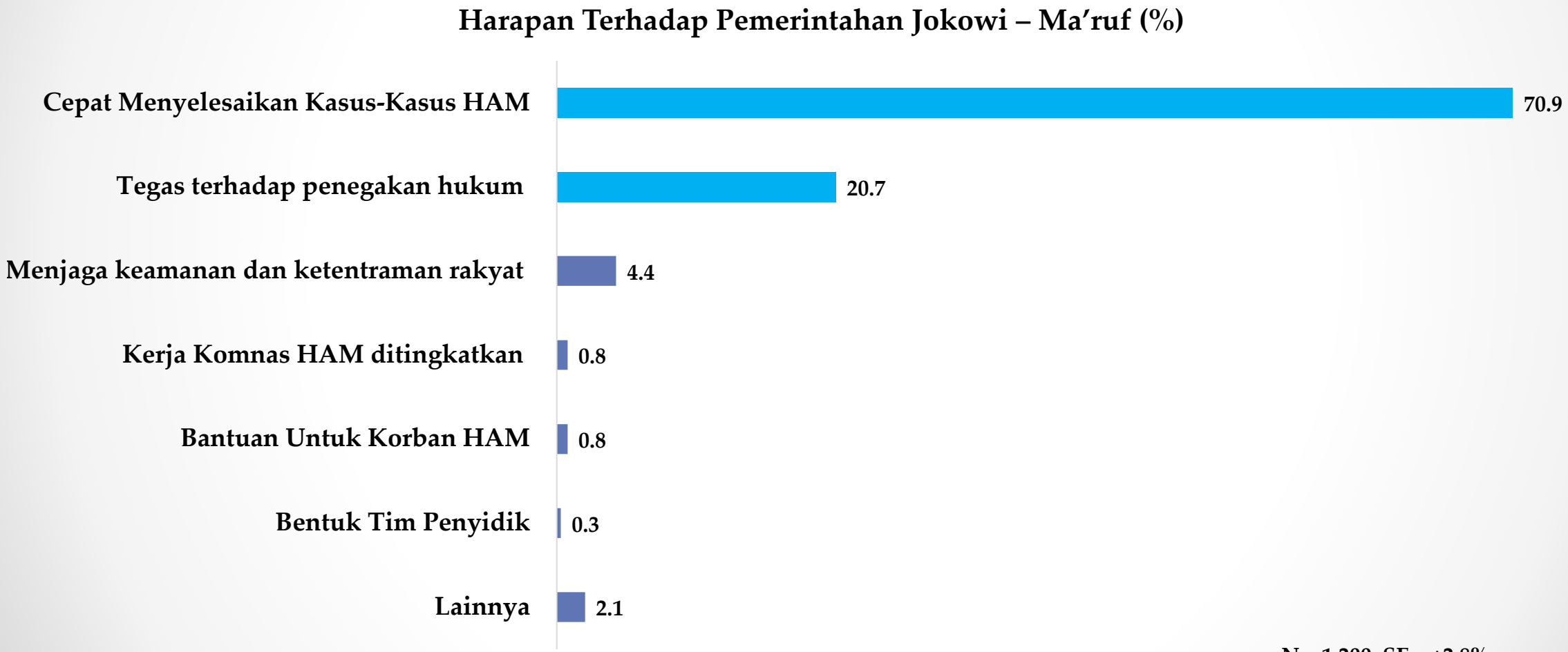
Meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional



N = 1.200; SE = ±2,8%

Harapan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas



N = 1.200; SE = ±2,8%

Kesimpulan dan Rekomendasi (1)

- Penyelesaian kasus HAM masa lalu masih simpang siur di mata publik
- Diperlukan edukasi terkait pemahaman kasus HAM dan proses penyelesaiannya di semua generasi
- Meski mayoritas responden berpendapat kasus HAM masa lalu perlu dituntaskan, masih ada 17.8% yang berpendapat tidak perlu ; karena kasusnya dianggap sudah terlalu lama dan berhadapan dengan kepentingan politik

Kesimpulan dan Rekomendasi (2)

- Publik meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi - Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, karena ada nuansa politis
- Meski sebagian besar memilih pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, ada sebagian lainnya yang memilih pengadilan internasional
- Publik berharap pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas

TERIMA KASIH